

KEPEMUDAAN
2022

NO. 1, PERDA KOTA BALIKPAPAN 2022/ LD 61, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

ABSTRAK : - Dalam rangka upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, program kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan.

- UUD Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.40 Tahun 2009; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 11 Tahun 2020.
- Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, seta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-citanya. Selain itu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan Pelayanan Kepemudaan.
- 1. KETENTUAN UMUM; 2. FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN; 3. TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; 4. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA; 5. PEMBERDAYAAN; 6. PENGEMBANGAN; 7. KOORDINASI DAN KEMITRAAN; 8. SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN; 9. ORGANISASI KEPEMUDAAN; 10. PERAN SERTA MASYARAKAT; 11. PENGHARGAAN; 12. PENDANAAN.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 19 Mei 2022. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kepemudaan Lampiran: 6 hlm.

